

## Fenomena Munculnya Militan Buddhis di Myanmar dan Sri Lanka

**Madiyono Madiyono**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
medhaviro@gmail.com

**Hajjah Sri Rahayu Nurjanah binti Haji Dollah**

Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam  
sriahayudollah.unissa@gmail.com

### **Suggested Citation:**

Madiyono, Madiyono; Dollah, Hajjah Sri Rahayu Nurjanah binti Haji. (2023) Fenomena Munculnya Militan Buddhis di Myanmar dan Sri Lanka. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 1: 159-174. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i1.24386>

### **Article's History:**

Received March 2023; Revised March 2023; Accepted March 2023.  
2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

### **Abstract:**

*For more than 2500 years, Buddhism was known as a religion of non-violence. However, in the modern era, in Myanmar and Sri Lanka, there has been a nationalist movement that emphasizes ethnic and religious (ethno-religious) identities. The movement has escalated anxiety-provoking conflicts and acts of violence against ethnic minorities. This article discusses the emergence of militant Buddhist movements in Myanmar and Sri Lanka. The method used in the study is library research by describing it in depth and accompanied by critical analysis. Data is collected from various sources. The analysis results concluded that the militant movements in Myanmar and Sri Lanka were pioneered by hard-line monks, who did not reflect the attitude of the majority group of monks but had influence over some Buddhists. Militant movements with ethnoreligious nuances spread anti-religious incitement, especially against Islam (Islamophobia), which is considered a threat to the existence of the majority ethnicity, Buddhism, and the state that protects Buddhism. The impact is the occurrence of conflicts that cause fear, persecution, and acts of violence against ethnic minorities. The ethnoreligious movement developing in Myanmar and Sri Lanka is not purely a religious conflict. Still, it has economic and political motives more clearly by using religious issues as a movement for legitimacy. This can be seen from the background and history of the conflict in the past and also from the attitudes and actions of the movement's pioneers, who have been criticized for inciting to boycott of Muslim businesses in their country. Religion is used as an instrument to achieve group goals and interests. However, the impact can be counterproductive: instead of protecting Buddhism, on the contrary, it can reduce the image of Buddhism as a religion that prohibits non-violence.*

**Keywords:** *ethno-religious; Islamophobia; interest groups; movement legitimacy; religious conflict*

### **Abstrak:**

Selama lebih dari 2500 tahun, agama Buddha dikenal sebagai agama tanpa kekerasan. Namun fenomena di era modern, di Myanmar dan Sri Lanka muncul gerakan nasionalisme yang menonjolkan identitas perbedaan etnis dan agama (*ethno-religious*). Gerakan itu telah meningkatkan konflik yang mengakibatkan diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap etnis minoritas. Dalam artikel ini dibahas mengenai fenomena munculnya gerakan militan Buddhis di Myanmar dan Sri Lanka. Metode yang digunakan dalam kajian adalah *library research* dengan mendeskripsikan dengan mendalam dan juga disertai analisis kritis. Data dikumpulkan dari

berbagai sumber. Hasil analisis menyimpulkan bahwa gerakan militan di Myanmar dan Sri Lanka dipelopori oleh bhikkhu berhaluan keras, yang tidak mencerminkan sikap kelompok bhikkhu mayoritas namun memiliki pengaruh terhadap sebagian umat Buddha. Gerakan militan bernuansa *ethno-religious* menyebarkan hasutan anti agama lain, terutama terhadap Islam (Islamofobia), yang dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi etnis mayoritas, agama Buddha, dan juga negara yang melindungi agama Buddha. Dampaknya adalah terjadi konflik yang menimbulkan diskriminasi, persekusi, dan tindakan kekerasan terhadap etnis minoritas. Gerakan *ethno-religious* yang berkembang di Myanmar dan Sri Lanka bukanlah murni konflik agama namun lebih jelas bermotif ekonomi dan politik dengan menggunakan isu agama sebagai legitimasi gerakan. Hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang dan sejarah konflik pada masa lalu dan juga dari sikap dan tindakan pelopor gerakan yang pernah dihukum karena menghasut untuk memboikot bisnis muslim di negaranya. Agama dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan kepentingan kelompok. Namun dampaknya dapat kontraproduktif: bukannya akan menjaga agama Buddha tetapi dapat sebaliknya yaitu akan menurunkan citra agama Buddha sebagai agama yang mengajarkan anti kekerasan.

**Kata Kunci:** etno-religius; Islamophobia; kepentingan kelompok; legitimasi gerakan; konflik agama

## PENDAHULUAN

Saat ini agama Buddha sudah mewarnai kehidupan manusia lebih dari dua puluh lima abad. Sepanjang rentang waktu yang lama tersebut juga membuktikan bahwa ajaran Buddha tetap masih relevan dengan kehidupan manusia dan kemajuan di era kontemporer. Agama Buddha saat ini masih eksis, dan bahkan di beberapa negara, seperti di Myanmar, Thailand, Sri Lanka, China dan Korea, penganut agama Buddha jumlahnya lebih banyak daripada penganut agama lainnya. Agama Buddha juga masih memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik budaya, ekonomi, politik, sosial dan lainnya. Di beberapa negara, pengaruh agama Buddha masih besar terhadap pemerintah, maupun kehidupan warga negaranya.

Dalam perjalanan waktu lebih dari 2500 tahun, agama Buddha dikenal sebagai agama tanpa kekerasan. Di dibandingkan dengan agama-agama dunia, agama Buddha termasuk agama yang relatif damai pasif dan eksotis, menarik diri dari secara total dalam urusan dunia (*lokiya*) dengan praktik meditasi. Sejak awal dikenalkan oleh pendirinya yaitu Buddha Gotama, tidak pernah ada kekerasan atau peperangan demi agama Buddha. Tidak ada kisah dalam sejarah agama Buddha pada masa awal, terjadi peperangan yang dimaksudkan untuk menyebarkan agama Buddha. Tidak ada cerita militansi umat Buddha (militan buddhis) yang melakukan berbagai tindakan dan perjuangan membela agama dengan disertai kekerasan demi keberlangsungan agama Buddha. Di sisi lain justru sebaliknya, Buddha sendiri memberikan teladan dengan terlibat langsung dalam rangka mencegah peperangan antara suku Koliya dan suku Sakya (Jerryson & Juergensmeyer, 2010).

Popularitas agama Buddha sebagai agama tanpa kekerasan tetap terjaga sangat lama, namun terutama pada abad ke-21 ini terjadi dinamisasi dalam masyarakat di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Di beberapa negara, seperti di Myanmar dan Sri Lanka muncul gerakan yang menonjolkan identitas etnis, agama dan nasionalisme, dengan tujuan demi menjaga keberlangsungan negara dan kelestarian agama Buddha yang dianut oleh sebagian besar etnis mayoritas di negara tersebut. Di kedua negara tersebut, muncul gerakan bernuansa politik identitas, yang salah satunya menjadikan agama Buddha menjadi identitas dalam aktifitasnya. Gerakan nasionalisme yang juga berlatar etnis dan agama yang terjadi di Myanmar dan Sri Lanka tidak selalu menggunakan cara-cara damai, namun kekerasan pun dilakukan oleh kelompok militan yang ada di kedua negara tersebut. Di Myanmar terjadi tindak kekerasan yang melibatkan sebagian masyarakat yang beragama Buddha dan Islam, khususnya dari etnis Rohingya. Dari konflik yang terjadi, banyak pihak yang berpendapat bahwa agama Buddha dipandang turut mendukung kekerasan tersebut karena ada sebagian pemuka agama Buddha, yaitu beberapa bhikkhu, terutama yang dipimpin Ashin Wirathu turut menghasut dan memobilisasi massa melalui gerakan yang dipimpinya sehingga terjadi tindak kekerasan. Demikian pula di Sri Lanka juga muncul gerakan ultranasionalis etnis Sinhala yang beragama Buddha. Munculnya gerakan *ethno-religious* dan juga ultranasionalis yang juga menggunakan cara kekerasan dalam aksinya, yang muncul di kalangan etnis mayoritas yang beragama Buddha memberikan dampak bagi citra agama Buddha secara luas. Keterlibatan beberapa bhikkhu yang terlibat dalam kegiatan politik praktis dan gerakan ultranasionalis, seperti yang terjadi di Myanmar dan di Sri Lanka merupakan fenomena yang

jarang terjadi. Untuk mendalami hal tersebut, dalam artikel ini akan dikaji mengenai militan buddhis dan gerakan *etno-religious* ultranasionalis yang muncul di Myanmar dan Sri Lanka pada era modern.

## METODE

Artikel ini merupakan hasil kajian deskriptis analitis kritis yang dilakukan melalui *library research*. Pada prosesnya penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, antara lain dari jurnal, buku, majalah, dan website terpercaya yang membahas mengenai fenomena militansi dalam agama Buddha di era modern yang diindikasikan oleh munculnya gerakan etno-religius ultranasionalis di Myanmar dan Sri Lanka. Terhadap data-data dalam sumber tersebut, penulis melakukan analisis kritis dan menyajikan hasil kajiannya dalam bentuk artikel ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ajaran Buddha Melegimitasi Kekerasan dan Konflik?

Berkaitan dengan gerakan etno-religius ultranasionalis di Myanmar dan Sri Lanka seringkali menggunakan tindakan kekerasan dalam aktifitasnya. Ketika cara-cara damai tidak efektif untuk mencapai tujuan, maka tidak jarang cara kekerasan menjadi alternatif yang digunakan. Agar dapat memahami secara komprehensif mengenai hubungan tindakan kekerasan dan ajaran Buddha aliran Theravada yang dianut oleh massa yang melakukan gerakan etno-religius ultranasionalis di Myanmar dan Sri Lanka maka perlu diuraikan konsep dan pandangan agama Buddha mengenai tindakan kekerasan dan perang.

Agama Buddha merupakan salah satu agama yang dikenal sebagai agama damai, yang mengajarkan cinta kasih bukan saja kepada sesama manusia namun juga kepada semua makhluk. Popularitas agama Buddha sebagai agama damai bukan tanpa dasar. Perjalanan sejarah membuktikan bahwa sejak awal dikenalnya agama Buddha hingga abad ke-19, memang tidak ada peristiwa sejarah yang menunjukkan bahwa pernah terjadi perang, konflik, ataupun tindak kekerasan demi mempertahankan, menjaga, dan melestarikan agama Buddha, alih-alih ada upaya menarik umat agama lain untuk menjadi umat Buddha.

Agama Buddha memang agama misionaris, namun misinya bukan mencari umat apalagi dengan cara kekerasan. Saat itu, Buddha mengutus 60 bhikkhu anggota Sangha untuk menyebarkan agama Buddha demi kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dan dewa (Horner, 2007). Salah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa Buddha tidak berminat untuk mencari umat adalah kisah Upali (Nanamoli & Bodhi, 1995). Dalam Upali Sutta dikisahkan bahwa Upali yang merupakan orang terpendang dan menjadi murid cerdas dari Nigantha Nataputta, petapa telanjang pemimpin Jaina. Upali diutus untuk berdebat dengan Buddha dengan harapan dapat menunjukkan kelemahan ajaran Buddha. Namun pada akhir dialog, Upali justru sangat kagum dengan Buddha dan dengan sangat menggebu meminta Buddha agar menerima sebagai muridnya. Jika memang Buddha tertarik untuk mencari umat, maka Upali akan langsung diterima sebagai murid dan diarak berkeliling kota agar banyak orang mengetahui bahwa Upali, orang kaya dan terpendang murid Nigantha Nataputta telah menjadi murid Buddha dan hal tersebut dapat mempengaruhi banyak orang untuk menjadi penganut ajaran Buddha. Ternyata Buddha tidak menyarankan demikian. Bahkan permintaan Upali agar diterima menjadi murid Buddha di sampaikan secara langsung sampai tiga kali. Pada permintaan pertama dan kedua, Buddha menyampaikan agar Upali merenungkan dan memikirkan kembali niat untuk menjadi muridnya. Pada permintaan yang ketiga kali, akhirnya Buddha menerima Upali sebagai muridnya setelah melihat kesungguhan niatnya, dengan syarat Upali tetap menghormati guru sebelumnya dan tetap memberikan dukungan (derma) kepada mereka.

Sejak awal munculnya agama Buddha hingga sekitar 20 tahun setelahnya, agama (ajaran) Buddha terjaga dengan baik. Namun seiring meningkatnya popularitas agama Buddha, semakin banyak orang yang tertarik menjadi anggota komunitas murid Buddha (Sangha) dengan berbagai motif, sehingga mulai muncul satu persatu pelanggaran etika yang dilakukan oleh sebagian bhikkhu. Demi menjaga kehormatan Sangha maka Buddha menerapkan tata tertib bagi para bhikkhu. Hingga masa wafatnya Buddha, jumlah peraturan etika yang ditetapkan mencapai 227 aturan, yang kemudian dikenal sebagai Vinaya (Voyce, 1984). Dari 227 aturan bagi para bhikkhu, tak satupun aturan yang mengizinkan atau mengkondisikan bhikkhu untuk melakukan atau menyetujui tindakan kekerasan. Dalam Vinaya terdapat empat peraturan keras (*parajika*) yang jika dilakukan dapat menggugurkan statusnya menjadi bhikkhu secara langsung. Salah satunya yaitu jika seorang bhikkhu dengan sengaja membunuh, memberikan senjata untuk membunuh diri, atau menganjurkan untuk membunuh maka secara otomatis hilang status keanggotaannya dalam Sangha. Jelas

bahwa bhikkhu tidak diperbolehkan terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembunuhan dan tindak kekerasan. Bukan hanya bagi para bhikkhu, umat awam pun harus melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup dan menyebabkan makhluk lain menderita. Umat awam dilatih menjalankan lima aturan moralitas (pancasila atau pancasikkhapada) yaitu tekad untuk tidak melakukan pembunuhan, tekad untuk tidak mengambil barang yang bukan miliknya, tekad untuk tidak melakukan perbuatan asusila, tekad untuk tidak berbohong, dan tekad untuk tidak mengonsumsi minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran (Surya, 2009). Dalam setiap akhir doa dan pembacaan *paritta*, umat Buddha juga selalu melafalkan *sabbe satta bhavantu sukhittata*, harapan agar semua makhluk hidup berbahagia, tanpa kecuali. Selain melalui meditasi, praktik cinta kasih juga diwujudkan oleh umat awam dengan memilih penghidupan benar dengan tidak berjualan makhluk hidup ataupun yang menyebabkan makhluk hidup menderita. Praktik cinta kasih dilatih dengan melepas satwa (*Fang Sheng*) dan juga dengan memberikan bantuan dan empati kepada semua makhluk. Hal tersebut merupakan penghidupan benar (*samma avijja*) sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Jalan Mulia Beruas Delapan.

Ajaran nir kekerasan (*avihimsa*) juga dapat ditemukan pada Kitab Suci Dhammapada. Dalam Dandavagga ayat ke 129 dan 130 diuraikan bahwa semua makhluk gemetar terhadap hukuman (kekerasan). Semua makhluk takut akan kematian. Semua makhluk menyayangi kehidupannya. Dengan menempatkan diri pada posisi orang lain, seseorang hendaknya tidak membunuh atau tidak menyebabkan orang lain membunuh. Dalam Dhammapada ayat 131 dan 132 juga diuraikan bahwa seseorang yang mendambakan kebahagiaan dengan menganiaya makhluk lain yang juga menginginkan kebahagiaan maka setelah kematiannya tidak akan mendapatkan kebahagiaan, sebaliknya seseorang yang mendambakan kebahagiaan dengan tidak menindas atau menganiaya makhluk lain yang juga menginginkan kebahagiaan maka akan mendapatkan kebahagiaan pada kehidupan setelah kematiannya. Dalam Dhammapada ayat 184 juga diuraikan bahwa seseorang yang masih menyakiti makhluk lain sesungguhnya bukanlah seorang petapa (*bhikkhu*). Menurut Vinaya, seorang bhikkhu bahkan tidak dibenarkan untuk merusak dan mengotori sumber air dan juga merusak tumbuhan. Demikian ketat aturan bagi murid Buddha, terutama bagi mereka yang memilih menjadi bhikkhu/bhikkhuni, hidup selibat dan focus pada latihan pengembangan spiritual.

Ajaran Buddha secara konseptual selalu menganjurkan umatnya untuk terus melatih diri menghindari kejahatan, menambah kebajikan, dan menyucikan hati dan pikiran (Senart et al., 1921). Dalam proses melatih diri mensucikan hati dan pikiran, dalam setiap ibadahnya, umat Buddha melakukan meditasi, yang paling sering dengan objek cinta kasih (*metta*). Dipancarkannya cinta kasih (*metta*) ke seluruh penjuru demi kebahagiaan semua makhluk. Kepada mereka yang menderita umat Buddha mengembangkan kasih sayang (*karuna*), dan kepada mereka yang sedang berbahagia umat Buddha mengembangkan rasa turut bersuka cita (*mudita*) agar tidak muncul sifat iri hati. Selain itu, umat Buddha juga mengembangkan sikap batin seimbang (*uppekha*) sehingga batin kokoh ketika dipuji maupun dicela. Keempat hal tersebut disebut brahmavihara, kediaman luhur para dewa.

Dalam suatu kesempatan, Buddha menyatakan kepada Ananda bahwa ketika agamamu bahkan dicela, maka tidak dibenarkan untuk membalas dengan kekerasan. Sikap menghargai agama lain juga ditunjukkan oleh Raja Ashoka dengan dekrit yang menyatakan toleransi terhadap agama lain. Ashoka menyatakan bahwa jika ingin agama sendiri dihargai oleh umat agama lain dan juga jika ingin agama sendiri berkembang maka harus menghormati dan menghargai agama orang lain (Tanumihardja & dkk., 2016).

Agama Buddha secara konseptual mengajarkan tanpa kekerasan. Tindakan kekerasan apapun dianggap tidak memberikan kebaikan bagi pelaku dan juga yang menjadi objeknya. Tidak dibenarkan tindakan kekerasan demi mencapai tujuan. Tindakan kekerasan umumnya muncul dari sikap membenci dan antipati. Kebencian dalam berbagai bentuknya selalu menjadi masalah dan tidak dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Dalam Dhammapada ayat 5 Buddha menyatakan bahwa kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, namun hanya akan berakhir dengan cinta kasih. Dengan demikian, tindakan kekerasan yang berakar dari kebencian hanya akan mendatangkan masalah baru.

Tindakan kekerasan, misalnya perang, juga bukan solusi terhadap masalah. Perang hanya akan menambah masalah baru, baik bagi yang menang maupun yang kalah. Berkaitan dengan perang, Buddha menyatakan bahwa kemenangan menimbulkan kebencian dan yang kalah hidup dalam penderitaan. Setelah dapat melepaskan diri dari kemenangan dan kekalahan, orang yang penuh damai akan hidup Bahagia (Dhammapada XV.201) (Senart et al., 1921).

Buddha pernah terlibat langsung dalam upaya mencegah perang. Ketika Suku Sakya dan Suku Koliya berniat perang karena berebut air sungai Rohini, Buddha mendamaikannya. Buddha menganjurkan kepada

kedua suku yang bertikai untuk bermusyawarah. Bahkan pada kesempatan lain, Buddha juga turun langsung mencegah penyerangan Raja Ajatasatu kepada suku Vajji. Kotbahnya dikenal sebagai syarat suatu negara mencapai kesejahteraan. Buddha menjelaskan bahwa suatu bangsa jika ingin mencapai kesejahteraan bagi warganya seharusnya melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh suku Vajji, yaitu; (1) sering mengadakan pertemuan dan permusyawaratan yang mengikutsertakan orang banyak (menjalankan apa yang sekarang ini kita sebut demokrasi), (2) berhimpun, berkembang, hingga mencapai mufakat dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan rukun, (3) menjunjung konstitusi (kesepakatan) yang berlaku, tidak memberlakukan apa yang belum diundangkan, dan tidak juga mengabaikan apa yang telah diundangkan, (4) menghormati dan menyokong para sesepuh atau pemimpin yang bijaksana, juga memperhatikan amanat mereka, (5) melindungi dan menghormati kedudukan wanita (atau pihak yang lemah), (6) memelihara dan tidak mengabaikan kewajiban agama, (7) melindungi orang-orang suci dan bijaksana (Digha Nikaya II, 74-75).

Berkaitan dengan kepemimpinan yang ideal, menurut agama Buddha, seorang pemimpin (raja dunia/cakkavati) juga tidak menggunakan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah. Keberhasilan kepemimpinan Cakkavati adalah ketika dalam menjalankan roda kekuasaannya juga selaras dengan prinsip kebenaran (Anguttara Nikaya III. 14). Dalam Cakkavati Sihanada Sutta dijelaskan bahwa etika kepemimpinan raja dunia (Cakkavati) sebagai berikut: (1) seorang penguasa yang baik harus bersikap tidak memihak dan tidak berat sebelah terhadap rakyatnya. Ia tidak pilih kasih, tidak membedakan karena pamrih tertentu, (2) seorang penguasa yang baik harus bebas dari segala bentuk kebencian terhadap rakyatnya, (3) seorang penguasa yang baik harus tidak memperlihatkan ketakutan apapun dalam penyelenggaraan hukum, (4) seorang penguasa yang baik harus memiliki pengertian yang jernih akan hukum yang diselenggarakan (Cakkavati Sihanada Sutta).

Seorang penguasa atau raja juga hendaknya memiliki integritas dan moralitas yang tinggi. Dalam Lokasutta, Buddha menyatakan bahwa pemimpin yang kredibel adalah melakukan apa yang mereka katakan dan mengatakan apa yang mereka lakukan (*yathavadi-tathakari, yathakari-tathavadi*). Seorang pemimpin atau penguasa yang mampu memimpin adalah mereka yang memiliki moralitas yang tinggi, yang cakap dalam membantu rakyatnya yang kekurangan (Itivutaka 122). Bukan hanya moralitas yang menjadi kriteria atau pedoman seorang pemimpin atau raja yang masyur dan dihormati. Dalam Jataka, dijelaskan terdapat 10 hal yang dapat menjadi pedoman bagi seorang raja, disebut *dasaraja dhamma*. Kesepuluh hal tersebut adalah: (1) kedermawanan (*dana*), (2) moralitas (*sila*), (3) rela berkorban (*paricagga*), (4) ketulusan hati (*ajjava*), (5) ramah tamah (*maddava*), (6) sederhana (*tapa*), (7) tidak pemaarah (*akkodha*), (8) tidak melakukan kekerasan (*avihimsa*), (9) sabar (*khanti*), dan tidak bertentangan dengan kebenaran (*avirodana*). Kesepuluh hal ini menjadi pedoman seorang raja yang masyur dan dihormati rakyatnya. Jelas bahwa anti kekerasan (*avihimsa*) merupakan salah satu ciri pemimpin yang ideal dan sudah seharusnya dihindari sebagai cara menyelesaikan masalah.

Anti kekerasan (*ahimsa/avihimsa*) dalam agama Buddha merupakan ajaran yang harus terus dilatih dan dipraktikkan oleh anggota Sangha dan juga umat Buddha, namun bukan berarti bahwa para bhikkhu dan bhikkhuni anggota Sangha serta umat Buddha sudah benar-benar mampu untuk tidak melakukannya. Selama belum tercerahkan sempurna, menurut agama Buddha maka manusia masih memiliki sifat antipati dan rasa benci, yang dapat memicu tindak kekerasan. Umat Buddha awam mungkin merasa belum mampu mempraktikkan anti kekerasan secara total karena masih terikat pada berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari yang kadang membutuhkan kekerasan untuk mempertahankannya, sementara itu juga belum siap jika masuk ke Sangha menjadi bhikkhu/bhikkhuni. Namun, tindak kekerasan tetap tidak dibenarkan karena merupakan karma baru yang akan memperpanjang kehidupan dalam siklus samsara, dan berpotensi menjadi sebab kelahiran di alam rendah, salah satunya kelahiran di neraka (*Cullakamma Vibhanga Sutta*). Dalam Yodhajiva Sutta, dijelaskan kisah Yodhajiva, seorang pemimpin pasukan dan pejuang profesional bertanya pada Buddha: "apakah para pejuang yang gugur dalam medan perang akan dilahirkan kembali di alam Dewa bersama para Dewa yang gugur dalam pertempuran?" Secara singkat, jawaban Buddha adalah mereka yang gugur dalam pertempuran karena membunuh maka akan terlahir di neraka atau alam hewan (Lehr et al., 2019). Dari pernyataan ini, menunjukkan penjelasan Buddha bahwa akibat dari pembunuhan bahkan dalam perang pun dapat menyebabkan kelahiran di alam rendah, dan ini merupakan sikap anti kekerasan dengan menunjukkan bahwa kekerasan dan apalagi pembunuhan akan berdampak buruk bagi pelakunya.

Namun, beberapa pemikir dan sarjana berpendapat bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh militan Buddhis di Myanmar dan Sri Lanka yang muncul di era modern ini juga terinspirasi dari ajaran Buddha. Peter

Lehr, misalnya, berpendapat bahwa dalam agama Buddha aliran Theravada terdapat ajaran yang dapat diinterpretasi untuk melegitimasi kekerasan dan perang suci (*dharma yuda*) (Lehr et al., 2019). Orang Sri Lanka meyakini berdasarkan Kronik Mahavamsa dan Culavamsa bahwa Sri Lanka adalah tanah Dhamma (dhammadipa) yang ditetapkan sebagai pelestari dan pelindung Dhamma ajaran Buddha, sehingga Sri Lanka harus dibela demi kelestarian agama Buddha. Beberapa bhikkhu militan menerjemahkan bahwa cara tersebut bisa menggunakan kekerasan, jika perlu. Berbeda pendapat dengan Lehr, Matthew J. Walton menyatakan dalam agama Buddha tidak dikenal adanya perang suci (Walton, 2016).

Terhadap pandangan bahwa dalam hal kekerasan, tidak terkecuali juga ada dalam ajaran agama Buddha, Imtiyaz Yusuf memiliki pendapat berbeda. Imtiyaz Yusuf memiliki istilah sendiri untuk menyebut gerakan yang terjadi di Myanmar sebagai "non-violent Extremism". Imtiyaz Yusuf menyatakan, "*Monk don't attack. They don't engage in violence. They are trained not to be violent. But people like Wirathu can incite others to do violence*". Menurutnya dalam agama Buddha tidak ada ajaran yang melegitimasi kekerasan. Jika ada kekerasan mereka melegitimasi atas dasar nasionalisme (Yusuf, 2018).

### Etnis dan Agama di Myanmar dan Sri Lanka

Myanmar merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara yang sebelumnya dikenal dengan nama negara Burma atau Birma. Nama Burma awalnya diberikan oleh Inggris untuk menyebut wilayah yang didominasi oleh etnis Bamar (Burman). Namun selanjutnya nama Burma juga dipakai sebagai nama negara tersebut. Pada tanggal 18 Juni 1989 pemerintah Junta militer mengganti nama negara Burma menjadi Myanmar, dengan tujuan untuk meninggalkan kesan terhadap sejarah masa lalu yang cukup lama berada dalam kolonialisasi Inggris dan Jepang. Nama Myanmar lebih netral daripada Burma yang mencerminkan etnis mayoritas, sehingga diharapkan mampu menunjukkan keberagaman etnis di Myanmar. Terdapat 135 etnis di Myanmar dengan beragam bahasa dan budayanya (Yusuf, 2018).

Secara geografis, Myanmar berbatasan dengan beberapa negara lain. Di sebelah Barat, Myanmar berbatasan dengan India, Bangladesh, dan laut Benggala, di sebelah Timur berbatasan dengan Thailand, Laos, dan China. Di sebelah Selatan Myanmar berbatasan dengan Laut Andaman, sedangkan di sebelah Utara berbatasan dengan China. Dari deskripsi mengenai batas wilayah negara Myanmar, dapat dicermati bahwa negara tersebut dikelilingi oleh negara lain yang memiliki kedekatan dalam budaya dan agama. Negara Myanmar dan juga negara di sekitarnya, seperti Laos, Thailand, dan China merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Buddha. Thailand dan Laos merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha aliran Theravada, seperti halnya penduduk di Myanmar. Sementara di China agama Buddha aliran Mahayana juga berkembang dan dapat lestari hingga saat ini. Letaknya yang dekat dengan India sebagai titik awal munculnya agama Buddha, dan peran dalam perjalanan sejarah agama Buddha pada masa lampau di Myanmar menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan bagian penting dalam sejarah penyebaran agama Buddha (Yusuf, 2018).

Saat ini Myanmar merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Buddha aliran Theravada, selain Thailand, Laos, dan Sri Lanka. Jumlah penduduk Myanmar yang beragama Buddha mencapai 89,8%, sedangkan yang beragama Kristen ada 6,3%, Islam ada 2,3 % dan selebihnya ada agama Katolik, agama local dan lainnya. Agama Buddha dianut oleh sebagian besar etnis Bamar atau Burma, yang merupakan etnis mayoritas di negara Myanmar. Selain etnis Bamar, di negara tersebut terdapat etnis Karen, Kayah, arakan, Mon, Kachin, Chin, Rohingnya, dan ratusan etnis lainnya. Myanmar merupakan negara multi etnis yang memiliki beragam bahasa dan budaya. Namun, secara umum saat ini budaya yang berkembang di Myanmar secara signifikan dipengaruhi oleh agama Buddha aliran Theravada.

Menurut sejarah, sejak awal abad ke-1 dan 2, penduduk Myanmar mulai mengenal agama Buddha karena pada masa itu, Myanmar berada di jalur perdagangan lintas negara, salah satunya membawa para pedagang dari India, yang selain berdagang juga mengenalkan budaya dan agama Buddha. Sejak masa itu, agama Buddha berkembang pesat dengan dukungan secara politik oleh para raja. Salah satu raja yang berperan penting dalam perkembangan agama Buddha di Myanmar masa lalu adalah Raja Anawrata (1044-1078). Raja mendukung perkembangan agama Buddha aliran Theravada dan berperan dalam perjalanan sejarah agama Buddha. Agama Buddha aliran Theravada mengakar kuat di Myanmar, sehingga agama lain, misalnya Kristen, yang dikenalkan saat masa kolonial Inggris kurang berkembang. Pengaruh kuat agama Buddha bahkan diyakini mulai muncul sejak masa kehidupan Buddha Gotama. Orang Burma meyakini bahwa pada masa lampau, Buddha Gotama pernah mengunjungi tanah Myanmar. Pengaruh kuat agama Buddha

juga tercermin dari peran Myanmar dalam sejarah perkembangan agama Buddha, Myanmar termasuk sebagai negara yang dijadikan tempat Konsili Buddhis ke-5, dengan salah satu keputusannya menuliskan kotbah Buddha dalam Tipitaka ke batu marmer. Myanmar juga merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam kajian Abhidhamma Pitaka yang merupakan salah satu bagian dari Kitab Suci Tipitaka. Myanmar juga yang menjaga budaya agama Buddha, salah satunya adalah tradisi pindapatta yaitu kebiasaan bhikkhu/bhikkhuni dan juga para samanera/samaneri berkeliling menerima derma dari umat awam. Tradisi tersebut bahkan diapresiasi dan dinilai sebagai salah satu indikator Myanmar sebagai negara paling dermawan. Namun, di sisi lain di Myanmar juga terjadi konflik etnis bernuansa agama. Konflik etnis yang paling menonjol terjadi antara etnis Rakhine dan Bamar yang beragama Buddha dengan etnis Rohingya yang beragama Islam yang tinggal di negara bagian Rakhine (Arakan). Konflik tersebut melibatkan beberapa rahib beragama Buddha yang turut memperkeruh keadaan dengan hasutan kebencian kepada etnis Rohingya. Konflik yang terjadi antara kedua etnis tersebut juga menjadi bagian dari politik identitas yang dilakukan oleh Junta Militer yang berkuasa. Pemerintah membiarkan terjadinya persekusi terhadap etnis Rohingya.

Kondisi dan karakteristik yang serupa juga terjadi di Sri Lanka. Negara Sri Lanka secara geografis juga berdekatan dengan India sebagai titik awal perkembangan agama Buddha. Sri Lanka yang oleh masyarakat internasional juga disebut dengan istilah Ceylon merupakan negara kepulauan dengan berbatasan laut dengan India di sebelah Barat laut dan dengan Maladewa di sebelah barat daya. Penduduk Sri Lanka mayoritas dari etnis Sinhala yang beragama Buddha aliran Theravada. Di Sri Lanka jumlah penganut agama Buddha mencapai 70,20%. Selain agama Buddha juga berkembang agama lain, yaitu agama Hindu sebanyak 12,60%, agama Islam 9,70% dan agama Kristen sebanyak 7,40%. Hal 68. Sinhala merupakan etnis mayoritas di Sri Lanka yang menganut agama Buddha. Berdasarkan sensus tahun 2012, terdapat 74,9% penduduk Sri Lanka dari etnis Sinhala, yang 69,3% beragama Buddha Theravada. Sebagian kecil etnis Sinhala menganut agama Kristen. Selain Sinhala, juga terdapat etnis Tamil sebanyak 15,2%, yang sebagian besar beragama Islam, dan sebagian lainnya beragama Kristen dan Hindu. Total umat Islam di Sri Lanka dari berbagai etnis kurang lebih 9% dari total penduduk, termasuk dari pedagang keturunan Arab. Selain itu juga terdapat etnis Burgher, Sri Lanka Chetty dan Bharatha. Sebagian besar Muslim Sri Lanka menganut Sunni, meski terdapat pula penganut Tasawuf.

Sri Lanka merupakan negara berbentuk Republic Sosialis Demokratis yang pada masa lampau hingga tahun 1972 dikenal dengan nama Ceylon. Sri Lanka merupakan negara penting dalam Jalur Sutera sehingga etnis yang tinggal di negara tersebut juga beragam, termasuk pendatang Arab dan Melayu. Sri Lanka pernah mengalami penjajahan oleh Portugis, Belanda, dan Inggris. Letaknya yang strategis bagi perdagangan menyebabkan Sri Lanka sering mengalami invasi. Sri Lanka merdeka pada tanggal 4 Februari 1948 dan dibentuk sebagai Republik Sosialis Demokratis pada tanggal 22 Mei 1972. Meski sudah merdeka, namun konflik di Sri Lanka terus terjadi, terutama antara etnis Sinhala yang beragama Buddha dengan etnis Tamil. Etnis Sinhala merupakan etnis yang menguasai pemerintahan dan berusaha menjaga Sri Lanka sebagai negara yang menjaga agama Buddha aliran Theravada. Pada abad modern ini, bahkan muncul gerakan etno-religius ultranasionalis dari kelompok agama Buddha yang dalam aksinya juga tidak segan menggunakan cara kekerasan. Di Sri Lanka, sebagian bhikkhu juga aktif dalam politik praktis dan membentuk partai politik serta sebagai anggota parlemen.

### Gerakan Etno-Religius Ultranasionalis di Myanmar dan Sri Lanka

Fenomena sosial dan politik di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha aliran Theravada yang berada di Asia Tenggara menjadi kajian yang populer di kalangan akademisi. Meskipun telah banyak pengaruh positif agama Buddha terhadap penganutnya dan negara, namun belakangan ini banyak kajian menguraikan tentang konflik yang terjadi di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, antara lain konflik di Myanmar dan Sri Lanka yang diframing berlatar perbedaan etnis dan agama. Konflik bernuansa *etno-religious* pada era modern ini melibatkan beberapa rahib Buddha (bhikkhu) dari kelompok garis keras yang memperkeruh keadaan dengan melakukan hasutan kebencian pada etnis tertentu dan turut memobilisasi massa. Di Sri Lanka, beberapa bhikkhu juga aktif terlibat dalam politik praktis dan duduk sebagai anggota parlemen. Fakta tersebut menunjukkan hal yang sebaliknya dari tesis Max Weber mengenai agama Buddha India awal yang dianggap sebagai *otherworldly mystical* atau mistik non duniawi yang menghindari atau mengingkari urusan duniawi. Secara umum dapat dikelompokkan 3 jenis golongan bhikkhu dalam Sangha, yaitu kelompok bhikkhu progresif, kelompok bhikkhu moderat, dan kelompok bhikkhu garis keras, militan (ekstrimis) (Lehr et al., 2019). Di beberapa negara seperti di China, Vietnam, dan Kamboja,

beberapa bhikkhu/bhikkhuni memelopori *Sosially Engaged Buddhism* yang memberikan peran dalam mengatasi kemiskinan dan lingkungan, merupakan gerakan yang dilakukan oleh kelompok bhikkhu progresif. Kelompok bhikkhu moderat cenderung tidak terlibat dan menahan diri dari urusan politik. Sementara itu di Myanmar dan Sri Lanka, pada abad ke-21 ini beberapa rahib Buddha turut dalam gerakan etno-religius nasionalis yang militan yang dalam aktifitasnya juga menghasut anggotanya melakukan kekerasan. Meski jumlah bhikkhu yang terlibat dalam gerakan etno-religius nasionalis tersebut tidak mencerminkan peran mayoritas bhikkhu di negara tersebut, namun fakta keterlibatan beberapa bhikkhu dalam gerakan juga tidak terbantahkan.

Pada abad ke-21 berkembang gerakan sosial di Myanmar dan Sri Lanka yang memiliki kemiripan dalam beberapa aspek. Gerakan sosial yang berkembang di Myanmar dan Sri Lanka merupakan gerakan dalam bidang politik yang menggunakan perbedaan etnis dan agama sebagai sarana dan framing untuk mengobarkan semangat nasionalisme. Jenis nasionalisme yang berkembang di kedua negara tersebut juga merupakan nasionalisme yang berlebihan, nasionalisme sempit dengan nuansa etnis dan agama yang sangat kuat. Nasionalisme religious yang ditunjukkan oleh etnis mayoritas dan didukung oleh pemerintah di sisi lain justru sangat membahayakan integrasi negara karena diposisikan berhadapan dengan etnis minoritas yang memiliki agama berbeda. Oleh karena itu, gerakan sosial yang muncul di Myanmar dan Sri Lanka bukannya menyatukan warga bangsa di kedua negara tersebut, tetapi sebaliknya, semakin memperuncing perpecahan dan konflik antar etnis yang menyebabkan etnis minoritas semakin termarginalisasi. Negara dalam kondisi tidak stabil.

Di Myanmar konflik berlatar *etno-religious* terjadi antara etnis Rakhine yang beragama Buddha dengan kelompok yang beragama Islam, terutama dengan etnis Rohingya. Sebelum terjadi konflik dengan etnis Rohingya pada tahun 2012, pernah juga terjadi konflik etnis dalam skala besar dengan India muslim pada tahun 1930 dan 1938, atas dasar sentimen anti muslim. Saat kolonial Inggris, orang India muslim yang awalnya didatangkan secara besar-besaran untuk kepentingan kolonial Inggris dan tinggal di Yangon memiliki kehidupan ekonomi yang makmur. Sebagian menjadi pedagang permata, pemilik bisnis, pegawai pelabuhan dan pekerja pabrik, sehingga kehidupannya lebih baik daripada penduduk lokal. Konflik etnis saat itu didominasi atas ketidaksukaan karena faktor ekonomi, yang kemudian berkembang menjadi sentimen anti-muslim. Sebenarnya, di Myanmar, umat Islam terdiri minimal atas 4 kelompok yaitu: muslim India, muslim keturunan Persia-Burma yang disebut Pathi atau Zerbadee, muslim Hui China atau Panthay, dan muslim etnis Rohingya. Konflik *etno-religious* yang berkembang setelah Myanmar merdeka lebih banyak melibatkan etnis Rohingya dengan kelompok Buddha di Rakhine.

Etnis Rakhine dan Etnis Rohingya awalnya tinggal bersama di negara bagian Rakhine (dulu namanya Arakan), yang berbatasan dengan Bangladesh. Namun perbedaan etnis, agama, budaya, warna kulit, dan juga pandangan politiknya menjadikan relasi sosial mereka terganggu sehingga kondisi di kawasan Arakan tersebut sulit mencapai kehidupan yang damai dan harmoni. Salah satu sisi lain dari pengaruh agama dapat dipelajari dari kasus yang terjadi di Myanmar tersebut. Menurut Catarina Kinnwall (2004) perpaduan agama dan nasionalisme di satu sisi dapat menciptakan persatuan, kepercayaan, dan juga keamanan, namun di sisi lain dapat menyebabkan kebencian dan kekerasan di negara yang rentan dan multi etnis. Kondisi yang terjadi di negara bagian Rakhine (Arakan) Myanmar menunjukkan pola hubungan agama dan nasionalisme yang memiliki efek negatif, yang meningkatkan kekerasan terhadap etnis yang juga beragama berbeda, khususnya dari kelompok minoritas. Gerakan *etno-religious* ultranasionalisme bangkit di Myanmar yang ditandai munculnya beberapa bhikkhu militan yang membentuk organisasi sebagai kekuatan yang dimaksudkan oleh penggagasnya untuk mempertahankan kelestarian agama Buddha dan juga menjaga keberlangsungan pemerintah yang melindungi agama Buddha. Kelompok militan mempersepsikan bahwa kelompok mayoritas dan agama mereka sedang dalam ancaman dan bahaya menuju kepunahan sehingga perlu dilindungi. Jadi, nasionalisme yang digagas oleh bhikkhu militan adalah nasionalisme religious, yaitu mengobarkan semangat cinta tanah air Myanmar sebagai negara yang melindungi agama Buddha dan etnis mayoritas. Namun apakah yang dilakukan oleh bhikkhu militan dan umat Buddha militan benar murni masalah agama atau sebaliknya, menggunakan agama sebagai alat untuk melegalisasi tercapainya kepentingan lain?

Jika dirunut dari sejarah Myanmar maka akan tergambar kapan dan bagaimana nasionalisme mulai tumbuh di negara tersebut. Myanmar merupakan jajahan Inggris sejak tahun 1886. Hingga tahun 1937, Myanmar dijadikan salah satu provinsi oleh kolonial Inggris. Myanmar berada dalam kolonialisasi Inggris hingga berakhir pada tahun 1942. Mulai tahun 1942 hingga tahun 1945, Myanmar dijajah Jepang. Setelah Jepang kalah pada perang dunia II karena Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh sekutu, akhirnya Jepang



meninggalkan Myanmar. Negara Myanmar kembali menjadi jajahan Inggris hingga tahun 1948, dan merdeka pada tanggal 4 Januari 1948.

Inggris menguasai Myanmar melalui tiga peperangan yaitu perang Anglo-Burmese I (1824-1826). Pada perang tersebut wilayah Assam dan Manipur harus diserahkan ke pihak Inggris melalui perjanjian Treaty of Yandabo. Kemudian pada perang Anglo-Burmese II (1852-1853), Inggris berhasil menguasai Lower Burma dan pada perang Anglo-Burmese III (1885) Inggris dapat menguasai Upper Burma pada tanggal 1 Januari 1886. Titik kemenangan tersebut merupakan tanda bahwa sejak saat itu, Myanmar dalam kekuasaan kolonial Inggris. Myanmar berada dalam kolonisasi Inggris cukup lama. Saat itu, India lebih dahulu dijajah oleh Inggris yaitu mulai 23 Juni 1757. Dengan menaklukkan Myanmar, wilayah kekuasaan Inggris semakin luas.

Pada tahun 1919, Kongres India mendesak kolonial Inggris untuk melibatkan warga India dalam pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan India tahun 1919, maka ditetapkan bahwa pemerintahan di India dititikberatkan pada propinsi-propinsi dan pemerintahan di propinsi tersebut dipegang oleh Inggris untuk urusan yang penting dan urusan yang tidak penting dipegang oleh India. Sesama jajahan Inggris, Myanmar tidak dilibatkan dalam Montagu-Chelmsford Reform yang memunculkan Undang-Undang Pemerintahan India 1919. Myanmar hanya dijadikan salah satu propinsi dari kolonial Inggris. Salah satu kebijakan kolonial Inggris adalah membuka kesempatan terjadinya perpindahan umat Islam India ke wilayah Myanmar untuk kepentingan kolonial Inggris. Perpindahan secara besar-besaran umat Islam dari India pada akhirnya dapat mendominasi perekonomian di sebagian Myanmar. Hal tersebut menjadi ancaman bagi negara Myanmar. Atas keputusan tersebut, masyarakat Myanmar tidak tinggal diam. Tahun 1919 kemudian muncul gerakan nasionalisme Myanmar pertama kali yaitu The General Council of Burmese Association (GCBA).

Gerakan GCBA terang-terangan menentang Inggris. Gerakan GCBA terus berkembang pengaruhnya, Inggris tidak menyadari peran para rahib Buddha dan agama Buddha yang telah mengakar dengan kuat dalam budaya dan masyarakat Myanmar. Oleh karena itu, selama penjajahan, pengaruh kolonial Inggris tidak tertanam mendalam dalam budaya Myanmar. Misionaris Kristen yang menyebarkan agama Kristen ke Myanmar juga dampaknya tidak besar yang ditunjukkan fakta bahwa jumlah umat Kristen di Myanmar lebih sedikit daripada umat Buddha dan Islam. Hingga kini masyarakat Myanmar sebagian besar tetap memeluk agama Buddha.

Tahun 1920-1921, Mahatma Gandhi menerapkan politik non-kooperatif Satyagraha dengan pemerintahan Inggris. Gerakan Satyagraha tersebut turut mempengaruhi gerakan GCBA di Myanmar karena memiliki kesamaan sifat kehalusan dan tidak mengedepankan kekerasan dengan larangan membunuh dan menggunakan kekerasan.

Dalam perkembangannya, gerakan GCBA semakin mendapat dukungan masyarakat. Setelah itu, muncul gerakan nasionalisme lain, seperti: Sinyetha (1922), Myochit (1930), Do Burma Asiaone (1935) atau partai Thakin yang menuntut kemerdekaan penuh bagi Myanmar. Sebagian anggota Thakin kemudian membentuk The Anti Fascist People Freedom League (AFPFL) tahun 1944 setelah Myanmar merasakan penderitaan penindasan oleh Jepang, yang dipimpin oleh U Aung San dan Than Tun, dan dari perjuangan akhirnya mampu mendesak kolonial Inggris memberikan kemerdekaan kepada Myanmar pada 1948. Sayangnya, U Aung San, pimpinan AFPFL dibunuh pada tanggal 19 Juli 1947 oleh kelompok bersenjata. Dan peristiwa tersebut menegaskan awal konflik politik yang belum tuntas hingga saat ini.

Berkaitan dengan munculnya nasionalisme di Myanmar, para Pongyi yang merupakan para bhikkhu aktifis merupakan aktor utama gerakan melawan kolonial. Dalam masyarakat Myanmar, bhikkhu memiliki peran sentral yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Myanmar sehingga di sisi lain mampu menahan pengaruh misionaris Kristen yang datang bersama kolonial Inggris dan menyebarkan agama Kristen di Myanmar. Peran sebagian bhikkhu dalam perjalanan sejarah Myanmar sangat besar. Sebagian bhikkhu di Myanmar bukan hanya sebagai petapa pasif yang hanya menjalani kehidupan spiritual tanpa peduli dengan keadaan masyarakat. Sebaliknya, para bhikkhu di Myanmar sebagian turut bergerak dan berada di pihak masyarakat dengan melakukan perlawanan tanpa kekerasan, termasuk kepada kolonial, dan pemerintah junta militer yang berkuasa. Para bhikkhu mengecam tindakan Junta Militer terhadap para demonstran. Sebelumnya tahun 2007, para bhikkhu juga pernah turun ke jalan sebagai simbol perlawanan terhadap Junta Militer yang menerapkan kebijakan yang merugikan masyarakat yaitu menaikkan bahan bakar minyak secara drastis. Dari peristiwa tersebut, terdapat bhikkhu yang ditembak, dan sebagian lain yang mengalami kekerasan oleh pihak Junta. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Revolusi Saffron (Nilasari, 2013).

Penting di tegaskan bahwa dalam sejarah Myanmar, sebagian bhikkhu turut dalam gerakan sosial dan perannya memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat.

Perkembangan nasionalisme yang terjadi di Myanmar pada masa kemerdekaan berbeda dengan saat ini. Jika pada masa lampau, sikap nasionalisme muncul untuk melawan penjajah, maka setelah Myanmar merdeka, muncul sikap nasionalisme yang ekstrim (ultranasionalis) mengedepankan perbedaan etnis dan agama. Pada masa kini muncul gerakan *etno-religious* ultranasionalis yang melakukan gerakan kekerasan melawan kelompok yang dianggap mengancam eksistensi agama Buddha dan pemeluk agama Buddha. Meskipun bukan mencerminkan kelompok mayoritas Buddha, namun gerakan ultranasionalis dengan latar etnis dan agama memang muncul di Myanmar dan berperan dalam konflik *etno-religious* di era modern ini. Gerakan ultranasionalis tersebut dimotori oleh bhikkhu militan, yang dipimpin oleh Ashin Wirathu. Peran Ashin Wirathu dalam gerakan berciri *etno-religious* ultranasionalis sangat sentral karena memelopori gerakan 969 dan organisasi Ma Ba Tha yang berhaluan keras untuk melawan perkembangan Islam di Myanmar yang dianggap menjadi ancaman bagi negara dan kelestarian agama Buddha. Ashin Wirathu yang menggelorakan sentimen anti muslim juga sudah dilakukan sebelum tahun 2012. Sebelumnya pada tahun 2003, Ashin Wirathu telah dipenjarakan sejak 2003 karena melakukan kampanye nasional untuk memboikot bisnis yang dilakukan oleh Muslim (Hapsari, 2016). Ashin Wirathu dibebaskan tahun 2012, dari hukuman yang seharusnya dijalani selama 25 tahun. Sentimen anti muslim yang dikampanyekan oleh Ashin Wirathu sebelum konflik komunal tahun 2012 berlatar ekonomi. Hal serupa juga pernah terjadi pada tahun 1930 dan 1938 terhadap etnis India muslim yang lebih baik kehidupannya daripada penduduk asli.

Saat ini penduduk yang beragama Islam di Myanmar sekitar 15%. Agama Islam dianut oleh beberapa etnis di Myanmar, namun yang paling menonjol adalah dari etnis Rohingya. Dari total 15% penduduk yang beragama Islam, setengahnya tinggal di negara bagian Rakhine. Di negara bagian Rakhine tersebut, 59,7% beragama Buddha, 35,6% beragama Islam dari etnis Rohingya, dan juga terdapat agama-agama lain.

Di negara bagian Rakhine sering terjadi konflik antar etnis yang berbeda agama, terutama antara kelompok umat Buddha dengan etnis Rohingya. Salah satu akar penyebabnya adalah etnis Rohingya ditetapkan bukan bagian dari etnis yang ada di Myanmar sehingga mengalami persekusi dari etnis lain dan pemerintah. Orang etnis Rohingya memiliki ciri fisik yang juga berbeda dengan etnis Bamar. Orang Rohingya berkulit lebih gelap dan penampilannya pun lebih mirip dengan orang-orang dari Bangladesh dan India, memiliki budaya yang berbeda dengan orang Myanmar termasuk bahasa yang digunakan. Etnis Rohingya tinggal di Myanmar tetapi menggunakan bahasa yang berbeda dengan orang Myanmar. Orang Myanmar percaya bahwa etnis Rohingya adalah pendatang dari Bangladesh yang kemudian menempati wilayah Arakan sejak masa kolonial Inggris. Orang Myanmar menyebutnya Kala (hitam) atau Bengali. Orang dari etnis Rohingya sudah berad di Rakhine (Arakan) sejak lama. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa orang Rohingya sudah menempati Arakan sejak abad ke-8. Awalnya orang dari Bangladesh datang untuk tujuan dengan motif ekonomi dan juga untuk bertani untuk kepentingan kolonial Inggris.

Sebelum masa kemerdekaan, hubungan antara etnis yang beragama Buddha dan etnis Rohingya relatif harmonis. Konflik etnis mulai berkembang lagi pada masa-masa menjelang kemerdekaan Myanmar. Salah satu pemicunya adalah perbedaan haluan politik pada masa itu. Pada tahun 1942 kelompok muslim dari etnis Rohingya dan lainnya di wilayah Arakan memilih berpihak ke Inggris dengan bergabung dengan pasukan V Force bentukan kolonial Inggris, sementara itu penduduk yang beragama Buddha berada di pihak Jepang. Keperpihakan etnis Rohingya kepada Inggris dinilai Rohingya berada di pihak yang sama dengan penjajah. Kelompok muslim bergabung dengan Inggris karena dijanjikan mendapatkan wilayah khusus muslim bagi mereka. Hal tersebut menjadi catatan bahwa etnis Rohingya tidak berada satu visi dengan etnis mayoritas di Myanmar.

Ketika Myanmar merdeka pada tahun 1948 maka pemerintahan lebih didominasi oleh perwakilan dari kelompok Buddha. Selain karena tokoh pejuang kemerdekaan dari etnis mayoritas yang beragama Buddha juga karena orang muslim di Myanmar turut melawan orang Myanmar dalam kelompok yang saling berhadapan pada masa sebelum kemerdekaan. Ketidakefahaman antara kedua kelompok tersebut semakin menguat dan konflik sering terjadi. Di negara bagian Arakan juga terjadi pemberontakan oleh mujahid.

Setelah Myanmar dalam kekuasaan Junta Militer pada 1962, juga muncul beberapa gerakan militan dari kelompok etnis Rohingnya, antara lain: Rohingya Independence Force (1963), Rohingya Liberation Party (1971), Rohingya Patriotic Front (1974), Rohingya Solidarity Organization (RSO) (1980), Arakan Rohingya Islamic Front (1986), Arakan Rohingya National Organization (ARNO). Gerakan tersebut muncul untuk memperjuangkan kepentingan dari kelompok Islam di Rakhine khususnya dari etnis Rohingnya yang mendapat

perlakuan tidak adil dari pemerintahan Junta Militer dan kelompok militan buddhis. Persekusi dan perlakuan tidak adil terhadap etnis Rohingya di Myanmar akhirnya karena etnis Myanmar dianggap bukan bagian etnis Myanmar. Sejak 1982, kewarganegaraan etnis Rohingya dicabut sehingga orang dari etnis Rohingnya tidak memiliki kewarganegaraan dan rawan terhadap penganiayaan tanpa perlindungan. Orang etnis Myanmar mengalami perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah junta militer juga melakukan operasi Naga (Singh, 2014).

Pada tahun 2012, di Myanmar terjadi konflik antar etnis yang dampaknya sangat besar, dipicu oleh kejadian pemerkosaan perempuan Rakhine beragama Buddha oleh tiga pemuda Muslim di kota Ramri. Kemudian terjadi pembalasan yang dilakukan oleh sekelompok orang Rakhine yang menyebabkan 10 orang terbunuh dalam bus yang diduga membawa 3 pelaku pemerkosaan. Peristiwa tersebut berkembang menjadi konflik yang semakin meluas, yang mengakibatkan banyak korban jiwa, ratusan rumah dibakar, dan menyebabkan warga dari etnis Rohingnya akhirnya melakukan eksodus dan meninggalkan Rakhine mencari perlindungan ke negara lain. Dari tahun 2012 hingga 2018 Departemen imigrasi Bangladesh mencatat terdapat 1,07 juta imigran dari etnis Rohingnya. Sementara itu sekitar 300.0000 - 500.000 pengungsi etnis Rohingnya yang tidak tercatat secara resmi tinggal di kamp pengungsian. Mereka datang dengan perahu dan meminta suaka di negara Malaysia, Thailand, Indonesia, dan negara lainnya (Mohajan, 2018). Konflik dengan latar perbedaan etnis dan agama tersebut terus terjadi berulang dan menjadi masalah bagi negara lain, terutama di ASEAN.

Konflik paling tidak melibatkan tiga kelompok, yaitu kelompok etnis beragama Buddha, kelompok etnis beragama Islam (terutama Rohingya), dan pemerintah. Dari kelompok beragama Buddha muncul militan buddhis yang memperkeruh konflik yang terjadi. Kelompok militan buddhis yang ekstrim tergabung dalam organisasi gerakan 969 dan Ma Ba Tha yang dipimpin oleh Ashin Wirathu, yang menyebut dirinya Bin Laden dari Burma. Gerakan 969 dengan cepat berkembang sampai di negara lain, seperti di Thailand dan Sri Lanka. Gerakan 969 mengklaim bertujuan melindungi tradisi budaya Buddhis di beberapa negara dengan karaktersitik Buddhis. Kelompok militan Buddhis juga menjelaskan bahwa tidak dapat menoleransi tindakan kriminal atau perilaku berdosa, kekerasan, perbudakan perempuan terhadap etnis mereka. Oleh karena itu, mereka terus melakukan proganda dengan beberapa cara, antara lain: (1) memproduksi stiker 969 dan mendistribusikan kepada masyarakat dari kelompok Buddha, dan menganjurkan menempel stiker tersebut di kendaraan, halte bis, dan di rumah. Selain itu, kelompok 969 juga memproduksi CD dan DVD yang berisi ceramah-ceramah dari bhikkhu militan dari kelompok Ashin Wirathu yang provokatif. Kelompok gerakan 969 juga menyebarkan hasutan anti muslim melalui Facebook dan Youtube. Gerakan militan buddhis tersebut menyebabkan konflik semakin meluas dan sulit diatasi karena memiliki pengaruh besar terhadap etnis mayoritas yang beragama Buddha. Pihak pemerintah junta militer juga turut mendukung gerakan tersebut dengan menyebut stiker 969 sebagai simbol perdamaian. Pada Oktober 2016 terjadi penyerangan beberapa pos polisi oleh militan muslim di Rakhine, yang menyebabkan 9 polisi meninggal dan akibat darai peristiwa tersebut pemerintah akhirnya melakukan operasi militer di Rakhine yang dihuni oleh Etnis Rohingya. Operasi militer di Rakhine dikecam dunia internasional karena menyebabkan banyak pembakaran rumah, pembunuhan dan tindak kekerasan lainnya. Para militan Buddhis dari gerakan Ma Ba Tha juga memiliki peran dalam peristiwa itu. Ashin Wirathu dianggap bertanggung jawab terhadap konflik anti muslim di Myanmar dan memiliki peran signifikan dalam persekusi terhadap muslim Rohingya Ashin Wirathu dianggap bertanggung jawab terhadap konflik anti muslim di Myanmar dan memiliki peran signifikan dalam persekusi terhadap muslim Rohingya.

Atas keterlibatan Ashin Wirathu sebagai pemimpin Gerakan 969 dan Ma Ba Tha dalam melakukan hasutan kebencian sentimen anti muslim di Myanmar turut meningkatkan Islamphobia di negara tersebut, Komite Sangha Maha Nayaka, yang merupakan otoritas tertinggi agama Buddha di Myanmar mengambil langkah untuk menghentikan gerakan 969 dan Ma Ba Tha. Pada tanggal 23 Mei 2017, Sangha Maha Nayaka mengirimkan surat kepada pemerintah Aung San Su Kyi untuk menghentikan dan melarang semua aktifitas kelompok militan gerakan 969 dan Ma Ba Tha. Sebelumnya, Komite Sangha Maha Nayaka juga melarang Ashin Wirathu berkotbah selama satu tahun (Hasugian, 2017). Setelah dilarang, Ma Ba Tha berganti nama menjadi Yayasan Nasional Buddha Dhamma Purahita. Hal ini menegaskan bahwa dalam munculnya militan Buddhis di Myanmar bukanlah mencerminkan pandangan semua kelompok bhikkhu (Sangha) mayoritas melainkan gagasan dari beberapa bhikkhu yang berhaluan keras.

Myanmar dan Sri Lanka memiliki beberapa kesamaan dalam beberapa aspek. Ditinjau dari agama yang dianut, kedua negara tersebut merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha aliran

Theravada. Keduanya juga memiliki etnis mayoritas yang merupakan penganut agama Buddha Theravada, yaitu etnis Bamar (Burman) di Myanmar dan etnis Sinhala di Sri Lanka. Myanmar dan Sri Lanka juga merupakan negara yang berperan dalam sejarah agama Buddha. Di Sri Lanka pernah dilaksanakan Konsili Sangha ke empat yang pada saat itu juga dimulainya penulisan kitab suci Tipitaka dalam bahasa Pali. Di Sri Lanka juga pernah dilaksanakan penahbisan bhikkhuni Theravada pada masa lampau yang diinisiasi oleh anak Raja Ashoka, bhikkhu Mahinda dan Sanghamitta. Tidak berbeda jauh dengan Sri Lanka, di Myanmar juga pernah dilaksanakan peristiwa bersejarah dalam agama Buddha yaitu Konsili Sangha ke-5 yang saat itu juga diputuskan untuk menuliskan kotbah Buddha dalam lempeng Marmer. Orang Myanmar juga meyakini bahwa pada masa lampau, Buddha Gotama pernah beberapa kali mengunjungi Myanmar. Orang Sri Lanka meyakini bahwa Sri Lanka adalah negara yang dijadikan sebagai pelestari Dhamma ajaran Buddha (Dhammadipa). Dari aspek sejarah, juga terdapat kemiripan. Myanmar dan Sri Lanka sama-sama pernah diajajah oleh Inggris dan merdeka pada tanggal 4 Februari 1948, satu bulan setelah kemerdekaan Myanmar. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kedua negara tersebut memiliki sejarah berkaitan dengan perkembangan agama Buddha sejak masa lampau dan bertahan hingga kini.

Perjalanan sejarah bangsa Myanmar memang dihiasi dengan kekerasan etnis. Sejak masa lalu hingga abad ke-21 hal tersebut masih terus terjadi. Namun, pada abad ke-21 ini konflik yang terjadi diframing sebagai konflik berlatar perbedaan etnis dan agama sehingga dampaknya juga lebih luas. Terdapat kekhawatiran yang dirasakan oleh kelompok bhikkhu militan dan juga umat Buddha militan terhadap kemungkinan berkembangnya agama lain, terutama Islam yang dapat menggerus agama Buddha dan dapat menyapakan agama Buddha seperti yang terjadi Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh yang pada masa lampau merupakan bagian negara atau kerajaan yang mayoritas beragama Buddha.

Pada masa lalu, di kedua negara tersebut sebenarnya sudah terjalin kehidupan yang harmonis, antara etnis mayoritas yang beragama Buddha dengan umat Islam minoritas, namun hal tersebut semakin memudar dan pada abad ke-21 hubungan tersebut bahkan menjadi konflik panjang. Serupa dengan yang terjadi di Myanmar, memudarnya relasi Buddhis dan Muslim di Sri Lanka di abad 21 sebenarnya berakar pada sejarah konflik yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Etnis Sinhala sebagai etnis mayoritas yang beragama Buddha sejak masa lalu ingin mendominasi perannya di Sri Lanka namun ada kekhawatiran meningkatnya peran etnis minoritas seperti Tamil dan Moor yang memiliki agama yang berbeda dengan kebanyakan etnis Sinhala. Di Sri Lanka konflik etnis dan agama juga terjadi bukan hanya antara kelompok beragama Buddha dengan muslim saja namun juga dengan kelompok Kristen, Katolik, dan Hindu.

Sri Lanka secara historis adalah negara Buddhis, yang sangat dipengaruhi oleh agama Buddha sejak dikenalkan oleh Bhikkhu Mahinda pada abad 3 SM yang merupakan anak Raja Ashoka. Ketika merasa terusik oleh etnis lain yang datang dari India muslim dan pengaruh kolonial Inggris maka muncul nasionalisme di kalangan etnis Sinhala. Memang negara Myanmar dan Sri Lanka merupakan negara jajahan Inggris dan mendapat perlakuan kebijakan yang mirip, termasuk terbukanya migrasi orang India muslim ke kedua negara tersebut. Atas kebijakan kolonial Inggris yang tidak sejalan dengan kepentingan penduduk negara Sri Lanka memunculkan nasionalisme. Namun nasionalisme yang muncul didasarkan pada semangat melindungi Sri Lanka sebagai tanah Buddha, budaya Buddhis, dan menjaga etnis Sinhala agar melestarikan agama Buddha. Nasionalisme yang dibangun atas dasar perbedaan etnis dan agama merupakan nasionalisme sempit yang mengabaikan peran etnis minoritas, sehingga dampaknya adalah terjadi ketegangan dan konflik etnis beberapa kali. Ketegangan semakin meningkat ketika sebagian bhikkhu di kota Kandy pada masa lalu mempromosikan negara kesatuan Buddhis (Malji, 2022). Di sisi lain hal tersebut juga disebabkan oleh kebijakan kolonial yang tidak sejalan dengan kepentingan etnis Sinhala sebagai etnis mayoritas di Sri Lanka.

Kolonial Portugis, Belanda, dan Inggris yang pernah menguasai Sri Lanka menjadi ancaman bagi agama dan budaya Buddhis yang sudah mengakar secara historis sejak masa kerajaan pada abad ketiga. Nasionalisme religious di Sri Lanka muncul untuk melawan kolonial dan para evangelis serta misionaris yang agresif saat kolonial Belanda dan Inggris, yang selain mendirikan sekolah Kristen juga meningkatkan jumlah orang etnis Tamil dan Sinhala yang berganti agama menjadi Kristen (Jayawardena, 2009). Kebangkitan nasionalisme Buddhis Sinhala pada masa kolonial adalah untuk melawan pengaruh agama, bahasa, dan budaya Barat. Nasionalisme buddhis di Sri Lanka muncul sebelum masa kemerdekaan dan telah mengakar dalam masyarakat dan sering meningkat menjadi kekerasan. Sebelum masa kemerdekaan, etnis yang berbeda agama hidup berdampingan dengan relative damai (Gunatilleke, 2018).

Pada tahun 1862 berdiri dua organisasi yaitu *The Society for Propagation of Buddhism* dan *The Buddhist Theosophical Society*. Organisasi ini dibentuk untuk menahan Kristenisasi dan budaya Barat namun yang terpenting adalah menjaga eksistensi agama Buddha dan etnis Sinhala (Herath, 2020). Hal tersebut karena pada tahun 1850 kebijakan agresif kolonial Inggris yang memaksakan penggunaan bahasa Inggris dengan mendirikan sekolah di kawasan Tamil serta memperkerjakan orang Tamil dalam birokrasi, yang membuat penduduk asli Sri Lanka tidak senang (Dharmadasa et al., 1992). Tahun 1891 tokoh nasionalisme bernama Anagarika Dharmapala mendirikan *Maha Bodhi Society* bukan hanya untuk melawan Kristenisasi namun juga mempromosikan agama Buddha, dan menekankan bahwa etnis Sinhala adalah etnis asli Sri Lanka, sedangkan etnis lain adalah pendatang atau penjajah (Guruge, 1967). Kebijakan kolonial Inggris yang bekerjasama dengan komunitas pedagang muslim semakin memojokkan pedagang local. Hal tersebut dijadikan sarana untuk mengobarkan semangat nasionalisme etnis Sinhala untuk menjaga agama, situs sejarah dan Budaya Buddhist yang dipersepsikan akan hancur ketika Sri Lanka oleh non Buddhist.

Tahun 1915 terjadi kerusuhan anti muslim di seluruh negeri, dipicu oleh sikap kelompok Islam di Gampola yang menolak perayaan agama Buddha yang melewati masjid mereka. Orang dari etnis Sinhala merasa bahwa mereka tidak memiliki kebebasan menjalankan upacara keagamaan di negeri mereka sendiri (Holt, 2016). Tahun 1931 ketegangan konflik beralih dari kelompok muslim ke Tamil karena konstitusi baru yang dibuat oleh kolonial melalui komisi Donoughmore tidak memungkinkan kelompok minoritas mampu memiliki perwakilannya dalam jumlah berarti. Setelah Sri Lanka merdeka, etnis Sinhala yang mayoritas berupaya agar etnis minoritas tidak memiliki perwakilannya di parlemen secara berarti. Hal tersebut semakin memicu konflik. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Kependudukan Ceylon tahun 1948, Sri Lanka mencabut kewarganegaraan etnis Tamil yang pindah ke Sri Lanka pada era kolonial. Kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan kepentingan etnis Tamil adalah memindahkan orang etnis Sinhala ke wilayah yang mayoritas etnis Tamil.

Tahun 1950an kelompok militan Buddhist mulai mempengaruhi partai politik agar membuat kebijakan yang eksklusif. Tahun 1970 an gerakan Jathika Chintanaya muncul dengan misi menjaga kemajuan dan budaya Buddhist yang sudah terbentuk sejak lama tidak dirusak oleh kelompok non Buddhist, dengan berbagai cara. Kelompok yang berada dalam posisi bersebarangan adalah kelompok Tamil dan muslim. Diskriminasi tersebut kemudian memicu perlawanan dari etnis Tamil dengan membentuk *The Liberation Tigers of Tamil Ealam (LTTE)* yang memperjuangkan pemisahan wilayah utara dan timur Sri Lanka dari pemerintah Sri Lanka. Selama 30 tahun terjadi perang sipil antara etnis Sinhala dan Tamil sejak 1983, menewaskan banyak orang di kedua belah pihak. Penyerangan terhadap situs suci agama Buddha, melakukan pembunuhan 37 bhikkhu dalam bus, pengeboman situs suci di Kuil Gigi di Kandy menewaskan setidaknya 17 orang dan melukai puluhan lainnya (Aspinall et al., 2013). Sebaliknya dalam perang selama 30 tahun, sebanyak 300-500 orang tewas oleh pasukan pemerintah. Perang berakhir pada tahun 2009 dengan kemenangan di pihak militer pemerintah yang mengalahkan The Liberation Tigers of Tamil Ealam (LTTE) (Aliff, 2015).

### **Kebangkitan Gerakan Nasionalisme Etno-Religius dan Islamphobia**

Dalam gerakannya, para bhikkhu militan, baik di Myanmar dan Sri Lanka menghasut umat awam dalam kelompoknya untuk mewaspadai terhadap perkembangan Muslim. Dalam ceramahnya, pimpinan gerakan dan bhikkhu militan yang bergabung dalam kelompoknya menyebarkan kebencian terhadap Islam karena sejarah masa lalu menunjukkan bahwa kemunduran dan kehancuran negara dan agama Buddha disebabkan oleh kelompok muslim. Pernyataan Ashin Wirathu berpengaruh terhadap etnis Bamar dan umat Buddha di sebagian Asia bahwa agama Buddha saat ini di kepong oleh Islam. Setelah berabad-abad menaklukkan tanah Buddha di Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Afganistan, sekarang mencari wilayah baru (Lehr et al., 2019).

Beberapa pernyataan yang menunjukkan bahwa nasionalisme religious sedang bangkit di Myanmar dapat dijelaskan dari pernyataan Ashin Wirathu, yang merupakan bhikkhu militan. Wirathu menyatakan: "Kita harus berbisnis dan berinteraksi hanya dengan sesama kita: ras yang sama dan keyakinan yang sama. Anda membeli di toko mereka (muslim), akan menguntungkan musuh. Mereka mengambil wanita kita, di Rakhine dengan ledakan populasi, mereka menangkapnya dan akan menguasai negara kita. Berbisnislah hanya dengan toko yang bertanda 969". Dalam majalah *The Diplomat*, Ashin Wirathu menyatakan: "*Muslims are fundamentally bad. Islam is a religion of thieves, the don't want peace. If Myanmar want to live in peace, Buddhist-Muslim have to live separately*". Pernyataan tersebut menunjukkan sikap nasionalisme yang mendasarkan pada politik identitas *etno-religious*. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh militan di Sri Lanka dengan slogan "*may Sinhala, apigay ratay*" yang artinya ini adalah negara kita, orang etnis Sinhala.

Dari uraian di atas jelas tergambar bahwa di era modern saat ini, di negara-negara yang menganut agama Buddha aliran Theravada, khususnya di Myanmar dan Sri Lanka muncul Islamfobia yang dimotori oleh bhikkhu militan yang memobilisasi kelompok umat Buddha militan. Dampak yang sudah dialami adalah meningkatnya kebencian terhadap kelompok Islam, yang ada di kedua negara tersebut. Kelompok Buddha di Myanmar dan Sri Lanka memiliki hubungan dekat dan saling mempengaruhi sehingga keputusan yang diambil pemerintah cenderung berpihak pada kepentingan etnis mayoritas dan menindas etnis minoritas sehingga konflik terjadi dan sulit diatasi. Namun menurut hasil kajian Raharjo (2015), agama dalam konflik di Myanmar dan Sri Lanka hanya dijadikan alat bagi para actor sekuritisasi untuk mendapatkan kepentingan masing-masing, baik dominasi kekuasaan politik maupun kepemilikan lahan dan kesempatan bisnis (Raharjo, 2015). Hal tersebut semakin menguatkan hipotesis Basedau dkk (2011) bahwa isu agama dan konflik dapat meningkatkan potensi kekerasan melalui pembangunan identitas kelompok yang dianggap mendapat legitimasi *transcendental* sehingga mudah dijadikan alat untuk memobilisasi massa. Hasutan kebencian (Islamfobia) yang dilakukan oleh kelompok militan juga bukan murni politik untuk memperjuangkan agama. Ashin Wirathu pada tahun 2003 pernah dipenjarakan karena menghasut untuk memboikot bisnis muslim. Jadi kepentingan ekonomi juga ada dalam misi gerakan 969 dan organisasi Ma Ba Tha. Di Sri Lanka juga terjadi hal yang serupa yaitu konflik melawan budaya makanan halal dan penggunaan hijab. Sertifikasi halal dianggap akan menguntungkan pebisnis muslim dan mengubah budaya etnis Sinhala. Munculnya kelompok militan etnis Sinhala Buddhis lebih disebabkan oleh faktor non-agama (Ahmed et al., 2022). Oleh karena itu, agama dalam hal ini lebih berfungsi instrumental. Namun dalam konflik di Myanmar dan Sri Lanka ada peran agama sebagai eskalator konflik sehingga hubungan agama dan konflik di kedua negara tersebut adalah konstruktif, meski agama bukan sumber konflik utama. Tindakan Ashin Wirathu dan Gnananasara Thera bukan mencerminkan sikap bhikkhu Sangha secara umum. Pimpinan tertinggi organisasi Sangha yaitu Maha Sangha Nayaka di kedua negara tersebut, tidak memberikan pembenaran terhadap tindakan kelompok militan meskipun juga tidak memiliki kekuatan penuh untuk melarang secara tegas.

Berbeda dengan di Thailand yang tidak memberikan peluang kepada bhikkhu untuk masuk dalam politik maka ketika terjadi kasus hasutan kebencian dan juga tindakan kriminal lainnya oleh oknum bhikkhu maka pemerintah dapat memaksa bhikkhu tersebut untuk ditindak dengan hukum positif setelah bhikkhu melepaskan jubah atas rekomendasi pimpinan Sangha tertinggi di negara tersebut. Di Myanmar dan Sri Lanka berbeda dengan Thailand. Bhikkhu di Myanmar memiliki pengaruh politik dan di Sri Lanka terlibat dalam politik. Dukungan dari masyarakat juga besar di kedua negara tersebut. Dampaknya, pemerintah Myanmar dan Sri Lanka tidak tegas menindak bhikkhu yang terlibat hasutan kebencian karena khawatir tidak mendapat dukungan pada periode pemilihan selanjutnya. Kemauan pemerintah Myanmar dan Sri Lanka dalam menindak kelompok militan Buddhis sangat rendah.

## KESIMPULAN

Gerakan *ethno-religious* yang berkembang di Myanmar dan Sri Lanka bukanlah murni konflik agama namun lebih kental bermotif ekonomi dan politik dengan menggunakan isu agama sebagai legitimasi gerakan. Hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang dan sejarah konflik pada masa kolonial dan juga dari sikap dan tindakan pelopor gerakan yang pernah mengalami hukuman akibat hasutan untuk memboikot bisnis muslim di negaranya. Pada masa kolonial Inggris, di Myanmar dan Sri Lanka pernah terjadi konflik dengan etnis India muslim yang secara ekonomi kehidupannya lebih baik daripada penduduk lokal. Pemimpin gerakan, yang merupakan bhikkhu militan berhaluan keras juga merupakan fenomena baru yang secara konsep juga tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Bhikkhu militan yang terlibat dalam kekerasan dan politik praktis tidak sesuai dengan aturan kebhikkhuan yang ditetapkan oleh Buddha sejak lebih dari 2500 tahun lalu. Meski gerakan nasionalisme *ethno-religious* bukan mencerminkan sikap mayoritas bhikkhu Sangha, namun pengaruh terhadap umat Buddha di kedua negara tersebut cukup besar. Di Myanmar dan Sri Lanka berbeda dengan Thailand. Bhikkhu di Myanmar memiliki pengaruh politik dan di Sri Lanka terlibat dalam politik. Dukungan dari masyarakat juga besar di kedua negara tersebut. Dampaknya, pemerintah Myanmar dan Sri Lanka tidak tegas menindak bhikkhu yang terlibat hasutan kebencian karena khawatir tidak mendapat dukungan pada periode pemilihan selanjutnya. Kemauan pemerintah Myanmar dan Sri Lanka dalam menindak kelompok militan Buddhis sangat rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, I., Ahmed, Z. S., Brasted, H., & Akbarzadeh, S. (2022). *Religion, Extremism and Violence in South Asia*. Springer Nature.
- Aliff, S. M. (2015). Post-war conflict in Sri Lanka: violence against Sri Lankan Muslims and Buddhist hegemony. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, 59, 109–125.
- Aspinall, E., Jeffrey, R., & Regan, A. J. (2013). *Diminishing Conflicts in Asia and the Pacific: Why Some Subside and Others Don't* (Vol. 13). Routledge.
- Dharmadasa, K. E. O., Dharmadāsa, K. E. Ö., & Dharmadasa, K. N. O. (1992). *Language, religion, and ethnic assertiveness: the growth of Sinhalese nationalism in Sri Lanka*. University of Michigan Press.
- Gunatilleke, G. (2018). *The Chronic and the Entrenched: Ethno-Religious Violence in Sri Lanka*. International Centre for Ethnic Studies/Equitas, Colombo.
- Guruge, A. W. P. (1967). *Anagarika Dharmapala*.
- Hapsari, R. D. (2016). Islamophobia dan Tindakan terhadap Minoritas Muslim oleh Pemerintah dan Kelompok 969 di Myanmar Tahun 2012-2016. *Global and Policy Journal of International Relations*, 4(02).
- Hasugian, M. R. (2017). Wirathu, Bisku Antimuslim Myanmar Dilarang Kotbah Selama Setahun. *Tempo.Co, Maret(11)*, 1. <https://dunia.tempo.co/read/854961/wirathu-biksu-antimuslim-myanmar-dilarang-kotbah-selama-setahun>
- Herath, D. (2020). Constructing Buddhists in Sri Lanka and Myanmar: Imaginary of a historically victimised community. *Asian Studies Review*, 44(2), 315–334.
- Holt, J. C. (2016). *Buddhist Extremists and Muslim Minorities: Religious Conflict in Contemporary Sri Lanka*. Oxford University Press.
- Horner, I. B. (2007). The Book of Discipline (Vinaya Pitaka) Volume IV. *Lancaster: The Pali Text Society. Joachim*.
- Jayawardena, K. (2009). *Nobodies to somebodies: the rise of the colonial bourgeoisie in Sri Lanka*. Colombo: Social Scientists' Association.
- Jerryson, M., & Juergensmeyer, M. (2010). *Buddhist warfare*. OUP USA.
- Lehr, P., Lehr, P., & Roughley. (2019). *Militant Buddhism*. Springer.
- Malji, A. (2022). *Religious Nationalism in Contemporary South Asia*. Cambridge University Press.
- Mohajan, H. (2018). *History of Rakhine State and the origin of the Rohingya Muslims*.
- Nanamoli, B., & Bodhi, B. (1995). The middle length discourses of the Buddha. *A Translation of the Majjhima Nikaya, Wisdom Publication, Somerville, MA*.
- Nilasari, Y. U. (2013). *Gerakan Perlawanan Para Biksu di Myanmar: Studi kasus Revolusi Saffron 2007*. Universitas Gadjah Mada.
- Raharjo, S. N. I. (2015). Peran identitas agama dalam konflik di Rakhine Myanmar tahun 2012–2013. *Jurnal Kajian Wilayah*, 6(1), 35–59.
- Senart, E., Barua, B. M., & Mitra, S. (1921). *Prakrit Dhammapada: Based Upon M. Senart's Kharoṣṭhī Manuscript with Text, Translation & Notes*. University of Calcutta.
- Singh, B. (2014). ASEAN, Myanmar and the Rohingya issue. *Himalayan and Central Asian Studies*, 18(1/2), 5.
- Surya, R. S. (2009). *Aturan Moralitas Buddhis: Pengertian, Penjelasan, dan Penerapan*. Insight Widyasena Production.
- Tanumihardja, E., & dkk. (2016). *Buku Kuliah Wajib Umum Pendidikan Agama Buddha*. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Rist, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Voyce, M. B. (1984). The communal discipline of the buddhist order of monks: The sanction of the Vinaya

Pitaka. *Am. J. Juris.*, 29, 123.

Walton, M. J. (2016). *Buddhism, politics and political thought in Myanmar*. Cambridge University Press.

Yusuf, I. (2018). Three faces of the Rohingya crisis: Religious nationalism, Asian Islamophobia, and delegitimizing citizenship. *Studia Islamika*, 25(3), 503–542.



© 2023 by the author. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).